

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR

oleh:
EGIS TEKTONA GRANDIS
NIM 3504140017

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang efisiensinya program e-planning yang diterapkan di BAPPEDA Kota Banjar; Dari sisi kepuasan, banyak keluhan dari pegawai BAPPEDA; Pada aspek keadaptasian, masih ada program kegiatan yang belum terakomodasi pada program di e-planning tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas sistem e-planning program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar; mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Banjar; dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Banjar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Sumber data sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teori untuk mengukur efektivitas menggunakan teori Gibson et al dalam Tangkilisan (2005:141). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektifitas sistem e-planning program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari setiap OPD sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem e-planning terkunci dan terdokumentasikan berupa softcopy, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya. Hal ini cukup direspon dengan baik oleh pegawai dari masing-masing OPD, karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran, sehingga adanya kesinergiasan antara sistem aplikasi lama dengan e-planning yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas. Sementara keefektifitasan yang dianggap belum baik tampak terjadi pada keluhan pegawai dalam mengaplikasikan sistem e-planning, selain itu antara keinginan penerima usulan program sistem e-planning harus mengacu pada alokasi kegiatan anggaran yang ada. 2) Efektifitas hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Banjar antara lain: terhambat dengan kekurangmampuan pegawai OPD dalam menerapkan sistem e-planning. Hal tersebut mengakibatkan kurang terintegrasinya e-planning sebagai lanjutan dari SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan sistem e-Planning di Bappeda Kota Banjar dilakukan dengan memberikan pemahaman, pensosialisasian, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem e-planning dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem e-planning, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar.

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang sedemikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan

pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah”. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah.

Selama ini sistem teknologi informasi selalu dikenal sebagai sebuah aktivitas yang sangat menyerap teknologi canggih, membutuhkan biaya yang besar dan sangat susah diimplementasikan secara cepat dan tepat. Semua ini merupakan sebuah pernyataan yang selalu

didukung oleh para penghalang dari perkembangan teknologi ini.

Sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka hak dan tanggungjawab pemerintah daerah makin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*.

Adapun beberapa permasalahan yang sering dialami oleh SKPD dalam penyusunan rencana yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan sebagaimana tertera dalam visi dan misi organisasi dalam dokumen Renstra SKPD.

Kemudian permasalahan lainnya adalah adanya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun dalam renstra yang sering kali menjadi permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Hal ini tentunya menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif rumusan-rumusan *action plan* menuju percepatan serta ketepatan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Maka dengan itu pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) atau biasa juga disebut *e-planning* adalah aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi *tools* dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, aturan ini sebagaimana diatur dalam Pemandagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

E-Planning yang berisi tentang menu-menu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.

Kota Banjar merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *e-planning* sebagai salah satu inovasi pemerintahan yang penerapnya di mulai pada tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil dari penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah dalam penerapan sistem *e-planning* oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar dengan indikasi-indikasi, sebagai berikut:

1. Kurang efisiensinya program *e-planning* yang diterapkan di BAPPEDA Kota Banjar. Hal ini karena dengan adanya program *e-planning* dirasa adanya waktu yang kurang hemat untuk menyinkronkan pengelolaan keuangan, dimana sebelumnya sudah ada di SIMDA (Sistem informasi Keuangan Daerah). Pengelolaan tersebut termasuk di dalamnya penomoran rekening program dan kegiatan.
2. Dari sisi kepuasan, pada program *e-Planing*, banyak keluhan dari pegawai BAPPEDA terutama dengan program kegiatan penomoran rekening pada program yang baru membutuhkan waktu sehingga adanya kelambanan dalam pemrosesannya. Di samping hal tersebut adanya perbedaan antara kegiatannya penomoran dengan program SIMDa (Sistem informasi Keuangan Daerah).
3. Pada aspek keadaptasian, masih ada program kegiatan yang belum terakomodasi pada program di *e-planning* tersebut. Hal tersebut berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan BAPPEDA Kota Banjar dalam memenuhi harapan SKPD Kota Banjar.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar”. Adapun masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem *e-planning* program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar?

B. LANDASAN TEORI

Efektivitas mempunyai kaitan dengan efisiensi namun keduanya tidak dapat disamakan karena antara efektivitas dan efisiensi memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam pencapaiannya suatu target, sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Saxena (dalam Indrawijaya 2010:176) bahwa:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Gibson (dalam Tika 2012:129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Produksi, produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.
2. Efisiensi, Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit,

pemborosan, waktu terulang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keluaran dengan biaya atau waktu yang digunakan.

3. Kepuasan, Kepuasan mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.
4. Keadaptasian, Keadaptasian mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
5. Kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup mengacu pada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang.

Terkait sistem dikemukakan bahwa ada tujuh dimensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hanif Al Fatta (2009:5) mengemukakan, bahwa karakteristik sistem sebagai berikut:

1. Komponen-Komponen. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. Batasan (*Boundry*). Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.
3. Lingkungan (*enviroment*). Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
4. Masukan (*input*). Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
5. Keluaran (*output*). Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
6. Penghubung (*interface*). Tempat dimana komponen atau sistem dan

lingkungannya bertemu dan berinteraksi.

7. Penyimpanan (*storage*). Area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.

Sistem *e-Planning* adalah Sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Pemandagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode deskriptif survey dengan memperhatikan kondisi objek yang alamiah. Deskripsi survey termasuk penelitian jenis kualitatif. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2014: 15) bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Fenomena yang diselidiki pada penelitian ini dilakukan melalui metode survey, selanjutnya hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah di Bappeda Kota Banjar

Terkait efektivitas penerapan sistem *e-planning* program pembangunan daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar, penulis dapat menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

1. Produksi

Berdasarkan dua dimensi terkait produksi yang terdiri dari dimensi sistem *e-planning* yang diterapkan BAPPEDA Kota Banjar dapat memberikan keuntungan dan dimensi kemudahan bagi SKPD di Kota Banjar, dapat diketahui bahwa pada dasarnya a) Sistem *e-planning* sudah memberikan keuntungan yakni program kegiatan yang diusulkan dari setiap OPD akan terkunci dan lebih terjamin, baik pada sistem SIMDA, Patroman Sistem ataupun program sistem KRISNA; b) Pada aspek kemudahan menggunakan *e-planning* dalam memberikan bagi OPD Kota Banjar dalam pendokumentasian program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD dalam bentuk *softcopy* akan dikonversi menjadi bentuk PDF.

Adanya produksi yang diperoleh dipandang bahwa *e-planning* dapat memberikan keuntungan bagi OPD dalam mengusulkan program sehingga dapat mengubah suatu keadaan secara efektif sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan pegawai dengan lebih baik. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Harsono (1994:4) bahwa “Produksi adalah setiap usaha manusia / kegiatan yang membawa benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan lebih baik”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari adanya *e-planning* yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap OPD akan terkunci dan lebih terjamin dalam aplikasi *e-planning*. Selain itu sudah memberikan kemudahan yakni pendokumentasian program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD diubah menjadi dalam bentuk PDF. Secara tidak langsung produksi ini dapat memberikan kebutuhan bagi manusia secara lebih baik.

2. Efisiensi

Berdasarkan dua dimensi terkait efisiensi yang terdiri dari dimensi sistem *e-planning* pada Bappeda Kota Banjar sebagai bentuk upaya penghematan waktu dan dimensi tenaga dalam proses perencanaan pembangunan, yang dapat

diketahui bahwa: a) aspek penghematan waktu, pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih dalam menyampaikan dokumen ke Bappeda karena hanya perlu menginput data yang dilakukan di masing-masing OPD, tidak seperti halnya dengan menggunakan metode manual, yang mengharuskan adanya mobilitas pegawai dalam menyetorkan *hardcopy*. Keefisienan lainnya yakni pegawai tidak harus menunggu jam kerja Bappeda, karena ketika program usulan sudah terinput secara otomatis, maka program usulan dari OPD dapat terinput dengan sendirinya; dan; b) sistem *e-planning* yang diterapkan oleh Bappeda Kota Banjar dapat meminimalisir pemborosan biaya dalam proses perencanaan pembangunan diketahui bahwa pengiriman program usulan yang disampaikan melalui sistem *e-planning* dari masing-masing OPD ke Bappeda hanya dalam bentuk *softcopy*.

Adanya keefisienan dari sistem *e-planning* yang dihasilkan dari Bappeda Kota Banjar, dapat dikatakan bahwa program *e-planning* termasuk sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak dan Muklis (2012: 17) berpendapat bahwa “efisiensi yang direncanakan, dengan cara produksi dengan biaya murah, tetapi dengan tetap sesuai harapan, baik mutu dan barang yang diproduksi maupun pelayanannya”.

Sebagaimana di dalam Bab I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa “Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari adanya *e-planning* berupa penghematan waktu dan pengurangan pemborosan biaya diketahui bahwa tidak perlu adanya mobilitas pegawai OPD dalam menyampaikan dokumen *hardcopy* ke Bappeda karena hanya perlu menginput dari masing-masing OPD. Keefisienan lainnya, *user* OPD tidak harus menunggu jam kerja Bappeda dalam menginput data; dan b) sistem *e-planning* pada

Bappeda Kota Banjar dapat mengurangi pemborosan biaya bahwa pengiriman program usulan yang disampaikan melalui sistem *e-planning* dari OPD ke Bappeda Kota Banjar hanya dalam bentuk *softcopy*.

3. Kepuasan

Berdasarkan dua dimensi terkait kepuasan yang terdiri dari dimensi penerimaan sikap pegawai Bappeda dan dimensi keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai Bappeda terkait penerapan *e-planning* di Kota Banjar, dapat diketahui bahwa: a) penerimaan sikap pegawai tampak menerima dengan adanya *e-planning* karena dengan sistem tersebut, pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih dalam menyampaikan dokumen ke Bappeda, karena hanya perlu meng-*input* data yang dilakukan di masing-masing OPD; dan b) dimensi keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai Bappeda terkait penerapan *e-planning* di Kota Banjar diperoleh informasi bahwa pegawai BAPPEDA Kota Banjar perlu pembelajaran agar dapat mengaplikasikan sistem *e-planning* baik dari perangkat halus ataupun perangkat keras agar tidak adanya keluhan yang dirasakan.

Adanya kepuasan yang dihasilkan dari sistem *e-planning* Bappeda Kota Banjar, dapat diketahui bahwa sikap pegawai Bappeda sangat menerima dalam menggunakan sistem *e-planning*, karena diperolehnya keuntungan dan kemudahan dalam menerapkan sistem tersebut, namun disamping hal tersebut perlu adanya pembelajaran bagi pegawai dalam menggunakan *e-planning* agar tidak adanya keluhan yang dirasakan dalam mengoperasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi terdiri dari keuntungan berdasarkan rasio antara *output* dan *input* yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (Tika, 2012:129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:

Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terulang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keluaran dengan biaya atau waktu yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai kepuasan menunjukkan bahwa kepuasan yang dihasilkan dari adanya *e-planning*, berupa keuntungan yang diindikasikan

dengan adanya *output* yakni sikap pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih banyak dalam menyampaikan dokumen atau program usulan ke Bappeda kota Banjar. Untuk aspek *input* yakni sikap pegawai Bappeda perlu pembelajaran dalam mengaplikasikan sistem *e-planning*.

4. Keadaptasian

Berdasarkan dua dimensi terkait keadaptasian yang terdiri dari dimensi kualitas produk yang dihasilkan dari adanya *e-planning* dan keadaptasian di dalam mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna sistem *e-planning*, dapat diketahui bahwa; a) kualitas produk yang dihasilkan yaitu sudah terdokumentasikannya program usulan yang sudah disetujui ataupun belum disetujui. Hal itu menunjukkan sudah diperolehnya kemudahan oleh masing-masing OPD di Kota Banjar. b) Pada aspek mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna sistem *e-planning* diketahui bahwa usulan program sebagai bentuk permintaan dari OPD hanya memilih program berdasarkan alokasi kegiatan yang ada. Kegiatan komunikasi dilakukan Bappeda sebagai bentuk agar OPD menginginkan terjadinya kesinergisan antara anggaran dan program yang diusulkan.

Hal ini menunjukkan bahwa keadaptasian berupa kualitas produk dan perwujudan keinginan penerima program, sudah lebih mudah di dalam pendokumentasian serta tersinergikannya antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sudah tanggap terhadap perubahan eksternal dan internal dengan mekanisme penerapan sistem *e-planning*. Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (Tika, 2012: 129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:

Keadaptasian, Keadaptasian mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai keadaptasian menunjukkan bahwa keadaptasian yang dihasilkan dari adanya *e-planning*, berupa kualitas produk yang dihasilkan seperti adanya pendokumentasian program usulan oleh Bappeda serta perwujudan tersebut yakni program yang diusulkan dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.

5. Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua dimensi pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari dimensi pertanggungjawaban untuk mengembangkan sistem *e-planning* dan dimensi *e-planning* sebagai program yang mampu mendukung pembangunan daerah di Kota Banjar secara berkelanjutan, dapat diketahui bahwa; a) bentuk pertanggungjawabannya, sistem *e-planning* dijadikan sebagai aplikasi pendamping SIMDA sistem dan PATROMAN sistem. Ketiga sistem tersebut digunakan agar terintegrasi antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang ada; b) sistem *e-planning* dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kota Banjar dapat diketahui bahwa antara sistem aplikasi lama yakni SIMDA dengan aplikasi program baru yakni *e-planning* dapat disinergikan yakni berfungsi sama untuk mengusulkan program prioritas. Kemudahan tersebut tentunya agar dapat mendukung proses pembangunan daerah, maka masing-masing OPD telah diberikan kemudahan.

Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup yang diperoleh dari adanya sistem *e-planning* sudah adanya pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk tuntutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 6 nomor 5 “yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat”.

Serta pada aspek sistem *e-planning* dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kota Banjar dalam menyelaraskan kemudahan mengusulkan program prioritas. Hal ini sebagaimana pada Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa:

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai kelangsungan hidup menunjukkan bahwa yang dihasilkan dari adanya *e-planning* berupa bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dihasilkan berupa produk sistem *e-planning* yaitu pembangunan daerah. Sementara untuk sistem *e-planning* dapat membantu program pembangunan daerah di Kota Banjar yakni sistem *e-planning* dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah dalam menyelaraskan kemudahan mengusulkan program prioritas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem *e-planning* program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar yakni terdokumentasikannya program prioritas dari setiap usulan OPD secara hemat dan mobilitas yang mudah. Selain hal tersebut adanya penyelarasan pagu anggaran dengan program pembangunan fisik sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPPEDA.

2. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sistem E-Planning di Bappeda Kota Banjar

Sistem *E-Planning* di Bappeda Kota Banjar akan kurang efektif jika dalam penerapannya masih ditemukan hambatan-hambatan. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* program pembangunan daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar adalah:

1. Produksi

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek produksi yang terdiri dari: a) hambatan pada sistem *e-planning* yang diterapkan BAPPEDA Kota Banjar dapat memberikan keuntungan bagi SKPD di Kota Banjar dan b) hambatan pada Proses pendokumenan melalui *e-planning* yang diterapkan BAPPEDA Kota Banjar memberikan

kemudahan bagi SKPD Kota Banjar, menunjukkan bahwa:

1. Belum terbiasanya *user* menggunakan sistem *e-planning* secara terprosedur, karena adanya waktu *deadline* untuk penutupan pengajuan usulan kegiatan program. Hambatan lain yaitu, ketika waktu pengusulan program telah ditutup, tetap saja adanya tarik ulur antara kebijakan legislatif dan yudikatif dalam menyusulkan program kegiatan, tentu hal tersebut dapat diasumsikan adanya kepentingan anggota DPRD Kota.
2. Pendokumentasian program usulan kegiatan dengan menggunakan *e-planning* seolah-olah terasa tergesa-gesa oleh sebagian besar pegawai OPD, karena adanya batasan waktu dan penekanan dari setiap waktu pengajuan programnya. Hal ini berbeda dengan metode konvensional, dimana program tidak diburu waktu. Hambatan lain belum lagi jika gangguan fasilitas jaringan internet yang berdampak pada pengoperasian program *e-planning* terganggu.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek produksi diketahui bahwa belum terbiasanya penerapan *e-planning* secara terprosedur, karena pendokumenan terkadang terganggu dengan jaringan internet.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek efisiensi yang terdiri dari; a) *e-planning* yang diterapkan oleh Bappeda untuk menghemat waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah; dan b) sistem *e-planning* yang diterapkan Bappeda Kota Banjar yang dapat meminimalisir pemborosan biaya, menunjukkan bahwa:

1. Usulan program yang belum selesai dari OPD akan terhambat dengan adanya batasan waktu yang sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Karena batas limit waktu pengajuan *e-planning* lebih cepat dibanding dengan limit waktu yang digunakan dengan pengusulan program manual.
2. Kegiatan program yang diusulkan ketika sistem sudah mencapai batas waktu pengusulan, maka *e-planning* sudah tidak bisa menerima. Penyebabnya terjadi karena adanya dari aspek sarana dan prasarana atau perangkat IT dan pengguna itu sendiri dalam meng-*input* data.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek efisiensi diketahui bahwa batasan waktu penutupan pengusulan *e-planning* program pembangunan lebih cepat dibanding menggunakan manual, sehingga program yang diusulkan tidak bisa diterima, ketika sistem sudah ditutup. Hal itu berdasar karena pengusulan waktu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kepuasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek kepuasan yang terdiri dari: a) penerimaan sikap pegawai BAPPEDA terhadap sistem *e-planning* Kota Banjar; b) keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai BAPPEDA Terkait Penerapan *e-planning* di Kota Banjar, menunjukkan bahwa:

1. Kurang pemahamannya atau dirasa sulitnya penggunaan *e-planning* oleh user, mengakibatkan sikap pegawai perlu belajar lagi dalam menguasai *e-planning*.
2. Ketika sistem sudah memasuki penutupan penerimaan data usulan program, maka OPD tidak akan dapat meng-*input* data sebelum pembukaan usulan program yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek kepuasan diketahui bahwa OPD kurang memahami penggunaan *e-planning*, sehingga perlu pelatihan untuk menguasainya, salah satunya ketika sistem penerimaan data usulan program ditutup, maka OPD tidak dapat meng-*input* data.

4. Keadaptasian

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek keadaptasian yang terdiri dari: a) hambatan pada kualitas produk yang dihasilkan BAPPEDA Kota Banjar memenuhi harapan SKPD Kota Banjar; dan b) hambatan BAPPEDA dapat mengetahui dan mewujudkan keinginan pengguna atau penerima sistem *e-planning*, menunjukkan bahwa:

1. Di dalam pendokumentasian program di Bappeda dan OPD perlu dilakukan lagi secara manual sehingga kualitas produk dipandang belum maksimal karena sistem komputerisasi hanya menghasilkan data *software*.
2. Tidak setiap usulan kegiatan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Hal tersebut karena harus mengacu pada Undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek keadaptasian diketahui bahwa pendokumentasian *e-planning* hanya menghasilkan data *softcopy*. Selain hal tersebut setiap usulan kegiatan, tidak sesuai dengan kebutuhan pengajuan program pembangunan daerah

5. Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari: a) hambatan pertanggungjawaban bagi BAPPEDA dalam memperbesar potensinya untuk mengembangkan sistem *e-planning* di Kota Banjar; b) Sistem *e-planning* dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kota Banjar secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa:

1. Sistem *e-planning* masih terganggu karena belum sepenuhnya terintegrasi dan tersinergi dengan Patroman sistem dan *e-budgeting*.
2. Sistem *e-planning* masih kurang terintegrasi dengan sistem aplikasi patroman sistem. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan yang mengakibatkan keterbatasan alokasi anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan yang diusulkan dari program OPD dari hasil Musrenbangdus, Musrenbangdes, dan Musrenbang-Kecamatan.

Inti dari pada hambatan efektivitas penerapan *e-planning* yang diterapkan di Kota Banjar ini terhambat dengan kekurangpahaman *stakeholders* dalam menerapkan sistem *e-planning*. Kurangnya pemahaman pegawai OPD dalam menggunakan *e-planning* mengakibatkan kurang terintegrasinya *e-planning* antara SIMDA, Patroman, dan Kresna Sistem, akibat lainnya program yang diusulkan kurang sesuai dengan pagu anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan efektivitas terjadi karena adanya faktor perorangan, kelompok, dan organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi.

Adanya hambatan penerapan *e-planning* dapat dijadikan untuk wadah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga dengan adanya alat bantu *e-planning*, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan yang ada di Bappeda dan OPD.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Penerapan Sistem *e-Planning* di BAPPEDA Kota Banjar

Upaya yang dilakukan karena ditemukan hambatan pada aspek efektivitas penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar. Permasalahan tersebut berawal karena ditemukannya hambatan pada keefektifitasan Penerapan Sistem *e-Planning* di Bappeda Kota Banjar. Untuk lebih jelas berikut ini penulis membahas upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar berikut ini:

1. Produksi

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek produksi yang terdiri dari: a) sistem *e-planning* yang diterapkan BAPPEDA Kota Banjar dapat memberikan keuntungan bagi SKPD di Kota Banjar dan b) hambatan pada Proses pendokumenan melalui *e-planning* yang diterapkan BAPPEDA Kota Banjar memberikan kemudahan bagi SKPD Kota Banjar, menunjukkan bahwa:

1. Pegawai Bappeda memanggil para pegawai yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar, biasanya untuk *touch klinik*. Jika ada yang merasa kesulitan-kesulitan di dalam meng-*input* data.
2. Adanya kegiatan mensosialisasikan kepada u yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar untuk segera mendokumentasikan program usulan program kegiatan, agar usulan kegiatan yang diajukan dijadikan skala prioritas.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek produksi menunjukkan bahwa BAPPEDA memanggil OPD untuk mensosialisasikan dan pelatihan berkaitan dengan pendokumentasian *e-planning*, sehingga usulan program pembangunan daerah menjadi skala prioritas.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek efisiensi yang terdiri dari: a) *e-planning* yang diterapkan oleh Bappeda untuk menghemat waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah; dan b) sistem *e-planning* yang diterapkan Bappeda Kota Banjar yang dapat meminimalisir pemborosan biaya, menunjukkan bahwa:

1. Bappeda menginformasikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Banjar agar di dalam mengusulkan program harus tepat waktu dan dapat diterima diterima oleh *user* BAPPEDA Kota Banjar
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pegawai yang ada di OPD, dengan diadakannya pelatihan-pelatihan. Selain hal tersebut untuk mengurangi pemborosan, maka dilakukan dengan mengusulkan program yang dipilih atau disetujui, tentunya usulan program yang pertama masuk ke sistem *e-planning* lebih awal.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek efisiensi menunjukkan bahwa BAPPEDA menginformasikan kepada OPD, usulan program awal dan tepat waktu, agar programnya dapat diterima dan mengurangi pemborosan

3. Kepuasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek kepuasan yang terdiri dari: a) penerimaan sikap pegawai BAPPEDA terhadap sistem *e-planning* Kota Banjar; b) keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai BAPPEDA Terkait Penerapan *e-planning* di Kota Banjar, menunjukkan bahwa:

1. Pegawai atau *user* yang ada di Organisasi Perangkat Daerah meningkatkan kemampuan kapasitas dalam menggunakan *e-planning* dengan melakukan pembelajaran lagi di dalam mengoperasikan sistem *e-planning*.
2. Bappeda sebagai administrator pusat yang ada di Kota Banjar, intensif dalam mengecek user yang ada di OPD serta semelihat berapa persentase program yang diajukan OPD kepada Bappeda.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek kepuasan menunjukkan bahwa Bappeda dan OPD perlu meningkatkan kapasitas dalam menggunakan *e-*

planning dengan melakukan pelatihan. Bappeda mengecek sistem *user* OPD dan melihat persentase program pembangunan daerah yang diajukan OPD.

4. Keadaptasian

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek keadaptasian yang terdiri dari: a) hambatan pada kualitas produk yang dihasilkan BAPPEDA Kota Banjar memenuhi harapan SKPD Kota Banjar; dan b) hambatan BAPPEDA dapat mengetahui dan mewujudkan keinginan pengguna atau penerima sistem *e-planning*, menunjukkan bahwa:

1. Adanya pendokumentasian program usulan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya OPD mengarsipkan dokumentasi arsip sebelum program tersebut diusulkan melalui sistem *e-planning* ke Bappeda.
2. Adanya sosialisasi kepada OPD agar mengetahui peraturan yang sebenarnya bahwa program usulan dari masing-masing OPD harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, baik dari banyak anggaran ataupun jenis pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* aspek keadaptasian, menunjukkan bahwa OPD mendokumentasikan secara manual sebelum program *softcopy* diusulkan melalui sistem *e-planning* ke Bappeda. Sosialisasi kepada OPD agar mengetahui peraturan penggunaan *e-planning*.

5. Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan *e-planning* pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari: a) BAPPEDA Kota Banjar dapat bertanggung jawab memperbesar potensinya untuk mengembangkan sistem *e-planning* di Kota Banjar; b) Sistem *e-planning* dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kota Banjar secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa:

1. Dilakukan secara integrasi antara sistem penganggaran yang terlebih dahulu lahir yakni SIMDA, patroman sistem, kresna sistem, dengan babak yang berbeda yakni sistem *e-planning*.
2. Mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat terintegrasi antara SIMDA, KRESNA,

dan PATROMAN sistem dengan sistem *e-planning*. Selain itu agar terjadi kelanjutan antara program yang diajukan dengan anggaran yang tersedia.

Inti dari pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan sistem *e-Planning* di Bappeda Kota Banjar dilakukan melalui pemberian pemahaman, pensosialisasian, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem *e-planning* dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem. Sehingga adanya implikasi yang terwujud yakni memerhatikan faktor waktu pelaksanaan dan tercapai program secara tepat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Starawaji (2009) mengatakan bahwa:

Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

Adanya *e-planning* dapat dijadikan untuk wadah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) adalah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga dengan adanya alat bantu *e-planning*, Bappeda dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan yang ada di Bappeda ataupun OPD.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan sistem *e-planning* program pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kota Banjar, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas sistem *e-planning* program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari setiap OPD sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem *e-planning* terkunci dan terdokumentasikan berupa *softcopy*, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-*input* data sehingga adanya pengurangan biaya. Hal ini cukup direspon dengan baik oleh pegawai dari masing-masing OPD, karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran, sehingga adanya kesinergisan antara sistem aplikasi lama dengan *e-planning* yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas. Sementara indikator yang dianggap belum baik tampak terjadi pada keluhan pegawai dalam mengaplikasikan sistem *e-planning*, selain itu antara keinginan penerima usulan program sistem *e-planning* harus mengacupada alokasi kegiatan anggaran yang ada.
2. Hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar antara lain: terhambat dengan kekurangmampuan dan kekurangpahaman pegawai OPD dalam menerapkan sistem *e-planning*, serta kurang terintegrasinya *e-planning* antara SIMDA, Patroman, dan Kresna Sistem.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektifitas penerapan sistem *e-Planning* di Bappeda Kota Banjar dilakukan dengan memberikan pemahaman, pensosialisasian, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem *e-planning* dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem.

2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada pegawai di Bappeda dan OPD yang sudah mampu

menerapkan sistem aplikasi *e-planning* harus dapat mempertahankan kemampuan tersebut serta memberikan pengetahuannya kepada pegawai lain yang belum mampu menerapkan sistem aplikasi *e-planning*.

2. Penulis memberikan saran kepada pegawai di Bappeda dan OPD yang belum mampu dan memahami penerapan sistem *e-planning* untuk belajar banyak kepada pegawai lain yang sudah memahami, agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisasi.
3. Penulis memberikan saran kepada pegawai yang ada di Bappeda atau OPD yang sudah mampu menerapkan sistem *e-planning* agar memberikan sosialisasi dan latihan kepada OPD lain yang belum memahami sistem aplikasi *e-planning*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gibson, James L. *et al.* 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hanif Alfata. 2009. *Analisis Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Andi
- Indrawijaya, Adam Ibrahim . 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru.
- Simanjutak, Timbul Hamanongan dan Imam Muklis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, Pabundu. 2016. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Cetakan Pertama*. PT Bumi Aksara

Dokumen:

- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.